



Judul : Penerapan Kembali PTM 100 Persen Perlu Dipertimbangkan Matang-matang
Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Penerapan Kembali PTM 100 Persen Perlu Dipertimbangkan Matang-matang

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyuarakan pandangannya, bahwa Pemerintah layak mempertimbangkan penerapan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen secara bertahap.

Menurut Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim, PTM 100 persen secara bertahap, bisa diterapkan bila kasus harian Covid-19 konsisten menurun dan *positivity rate* (PR) menyentuh 5 persen.

Untuk itu, P2G meminta Pemerintah dan Pemda memperhitungkan, memetakan perkembangan kasus Covid-19, setidaknya dua minggu ke depan, sampai awal April. "Ter-

masuk mengamati tren kasus Covid-19 secara global," ujarnya.

Sebab, lanjut Satriawan, berbagai varian yang muncul dan ledakan kasus terbaru di China, cukup mengkhawatirkan. Mengingat, Indonesia saling terkoneksi dengan negara lain seperti China. "Misalnya, dengan tingkat perjalanan wisata dari mancanegara ke Indonesia yang sudah dipermudah aturannya," tandas Satriawan.

Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menambahkan, jika PTM 100 persen akan diterapkan kembali, maka protokol kesehatan (prokes) harus diterapkan secara disiplin.

Berdasarkan evaluasi P2G terkait PTM 100 persen sejak Januari lalu, masih banyak terjadi pelanggaran Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Khususnya, disiplin prokes di sekolah. "Pelanggaran terjadi hampir di semua sekolah," ujar Iman.

Ia menambahkan, bentuk pelanggaran paling umum terjadi, yakni siswa dan guru tidak memakai masker di sekolah, tidak jaga jarak 1 meter di kelas, dan sekolah ber-AC kelasnya tidak membuka ventilasi.

Pelanggaran lain, kantin sudah beroperasi padahal dilarang SKB, tidak periksa suhu dan tidak foto barcode PeduliLindungi sebelum masuk sekolah, tidak pakai masker sepulang sekolah, dan siswa nongkrong sepulang sekolah, melanggar 3M.

Menurut Iman, implementasi SKB 4 Menteri hanya macan kertas, akibat minimnya pengawasan dari aparat di daerah. "Seperti

Satpol PP, Satgas Covid-19, Dinas Pendidikan dan kurangnya teladan disiplin prokes dari masyarakat," tandasnya.

Lalu, apakah sudah saatnya PTM 100 persen kembali diberlakukan? Berikut wawancara dengan Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira, dan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim mengenai hal ini.

SATRIWAN SALIM, Koordinator Nasional Perpustakaan Pendidikan Dan Guru

Dorongan Keinginan PTM Makin Kencang



Ikatan emosional guru-siswa, siswa-siswa tidak terbangun selama pandemi. Bahkan, masih ada siswa dan guru, atau siswa dengan siswa yang belum kenal satu sama lain, ironis.

Kapan sebaiknya PTM 100 persen kembali digelar?

Jika PR (positivity rate) sudah menyentuh angka lima persen, P2G mendukung sekolah menggelar PTM 100 persen.

Mengapa mengacu angka lima persen?

PR lima persen itu berdasarkan rekomendasi WHO (World Health Organization). Minggu terakhir, PR secara nasional sudah menyentuh 7-8 persen. Fakta tersebut menjadi perkembangan yang baik.

Banyak orangtua siswa mendorong PTM ya?

Memang semangat dan dorongan orangtua, siswa dan guru untuk segera memulai kembali PTM 100 persen, semakin kencang. Sejak tahun ajaran 2021/2022, kebijakan sering gonta-ganti. Mulai PJJ (pembelajaran jarak jauh) 100 persen, lalu PTM 50 persen, PTM 25 persen.

Apa dampak gonta-ganti sistem pembelajaran ini?

Kami lihat ini sangat berdampak terhadap psikologis siswa, termasuk motivasi belajarnya. *Learning loss* pun sudah kita rasakan selama pandemi. Anak-anak SD kelas rendah yang paling terdampak *learning loss*. Misalnya, mengenai keterampilan dasar membaca dan menghitung yang semakin tertinggal.

Apa yang mesti dilakukan jika PTM 100 persen kembali diberlakukan?

Aspek yang juga *urgent* adalah, membangun ikatan antara siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Evaluasi P2G selama dua tahun PJJ, sekolah dan guru menghadapi kendala yang cukup besar, kaitannya dengan membangun ikatan emosional dengan siswa.

Apalagi, siswa baru kelas 1-2 SD, kelas 7-8 SMP, dan kelas 10-11 SMA, mereka belum terlalu mengenal lingkungan belajar sekolah. Sebab, selama ini lingkungan belajarnya adalah rumah dan komputer. Bukan ruang nyata.

Ikatan emosional guru-siswa, siswa-siswa tidak terbangun selama pandemi. Bahkan, masih ada siswa dan guru, atau siswa dengan siswa yang belum kenal satu sama lain, ironis. ■ NNM

ANDREAS HUGO PAREIRA

Anggota Komisi X DPR

PTM 100 Persen Diputuskan Pemda



Jangan ragu, gunakanlah SKB Empat Menteri sebagai patokan pengambilan kebijakan, sebagai barometer untuk menjaga kesehatan siswa-siswi kita dari pandemi.

Positivity rate kasus Covid-19 menurun. Pemerintah disarankan bersiap menerapkan kembali PTM 100 persen. Pendapat Anda?

Kesulitan dari kebiasaan kita adalah, selalu menunggu petunjuk atau keluarnya peraturan dari Pemerintah Pusat saat pandemi ini.



Sebaiknya bagaimana?

SKB (Surat Keputusan Bersama) Empat Menteri, secara fleksibel telah memuat pengaturan untuk PTM (pembelajaran tatap muka) dan PJJ (pembelajaran jarak jauh).

Apa tujuan fleksibilitas SKB Empat Menteri itu?

SKB Empat Menteri itu fleksibel, mengingat kondisi tingkat penyebaran Covid-19 berbeda-beda di setiap daerah. Kondisi kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan di setiap daerah juga berbeda-beda.

Apa poin terpenting dari fleksibilitas SKB Empat Menteri ini?

Pelaksanaan PTM dan PJJ untuk setiap daerah, bahkan untuk setiap unit sekolah, bisa diputuskan oleh masing-masing daerah, bahkan sekolah.

Tentu saja dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi di daerah tersebut.

Contohnya?

Misalnya, dengan melihat level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di daerah itu. Dengan melihat level PPKM, suatu daerah dapat menentukan apakah PTM 100 persen atau 50 persen saja, misalnya.

Apa saran Anda untuk Pemerintah Daerah?

Jangan ragu, gunakanlah SKB Empat Menteri sebagai patokan pengambilan kebijakan, sebagai barometer untuk menjaga kesehatan siswa-siswi kita dari pandemi. Sekaligus, sebagai patokan proses pendidikan atau pengajaran di setiap daerah atau sekolah sesuai kondisi, kesiapan dan kebutuhan masing-masing daerah, masing-masing sekolah.

Bagaimana jika Pemda ragu mengambil keputusan?

Berdasarkan data dan hasil evaluasi yang dipegangnya, Pemda bisa berkonsultasi ke Satgas Covid-19 terlebih dahulu. Setelah itu, silakan Pemda memutuskan apakah sudah bisa melaksanakan PTM 100 persen. Ataukah masih 50 persen saja misalnya. ■ NNM